

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua. Kencana. Jakarta.
- Ahmad Setiawan. 2019. *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reforma Agraria)*. LaksBang Justitia. Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arba. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2019. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary*. West Publishing. St. Paul.
- Cornelius J. Moynihan. 1962. *Introduction to The Law of Real Property*. West Publishing. St. Paul.
- D. W. Pujiriyani, (et al.). 2014. *'Land Grabbing' Bibliografi Beranotasi*. STPN Press. Yogyakarta.
- D. Bachriadi dan A. Lucas. 2001. *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta.
- Elza Syarief. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Gramedia. Jakarta.
- Freek Colombijn. 2014. *Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing during the Decolonization of Indonesia, 1930-1960*. KITLV Press. Leiden.
- Gunanegara. 2019. *Hukum Perkebunan: Sejarah Hukum & Latar Belakangnya*. Adhi Sarana Nusantara. Jakarta.
- Herman Soesangobeng. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. STPN Press. Yogyakarta.
- I Ketut Oka Setiawan. 2020. *Hukum Agraria*. Reka Cipta. Bandung.

- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2017. *Kamus Agraria dan Tata Ruang*. Percetakan Pohon Cahaya.
- Lawrence Meir Friedman. 1977. *Law and Society An Introduction*. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice-Hall. New Jersey.
- Maria S. W. Sumardjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Muhammad Arfah Pattenreng. 2016. *Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah*. Bosowa Publishing Group. Makassar.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mustofa dan Suratman. 2013. *Penggunaan Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muwahid. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Press. Surabaya.
- Provincial Government of The Western Cape. 2003. *Unlawful Occupation of Land*. Western Cape.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, UMSU Press. Jakarta.
- Reko Dwi Salfutra. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Retna Dewi Lestari dan Tri Wisudawati. 2022. *Hukum Agraria dan Tata Ruang*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sri Susyanti Nur. 2010. *Bank Tanah: Alternatif Penyelesaian Masalah*

Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan. AS Publishing. Makassar.

Sukardi. 2016. *Sistem Hukum Di Indonesia*. TOP Indonesia. Pontianak.

Urip Santoso. 2008. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.

----- . 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.

----- . 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana. Jakarta.

----- . 2017. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Kencana. Jakarta.

Waskito dan Hadi Arnowo. 2017. *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*. Kencana. Jakarta.

Yahman, A. Nurasa dan W. Utami. 2015. *Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria-Pertanahan*. STPN Press. Yogyakarta.

Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana. Jakarta.

----- . 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Prenamedia. Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Gunanegara. "Pengambilalihan Hak Prioritas Bekas Pemegang Hak Untuk Distribusi Tanah Obyek Reforma Agraria". Journal of Comprehensive Science (JCS). Vol. 1 No. 4 Juli 2022.

Jum Anggriani. "Penerapan Asas Nasionalitas dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP No. 40 Tahun 1996)". Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Vol. 12 No. 1 Januari 2012.

Oalan Sitorus. "Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal terhadap Konsep Hak atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan)". Jurnal Bhumi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Vol. 2 No.1 Mei 2006

Rezky Dellah R. dan M. Nazir Salim. "Akuisisi Tanah-Tanah Rakyat:

Problem HGU PT. BMS di Jejang Lebong dan Jalan Penyelesaiannya”. *Jurnal Bhumi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Vol. 3 No. 1 Mei 2017.*

Sumiyati Beddu. “Analisis Hukum Okupasi Areal Tanah HGU PT. Bumi Sumalata Indah di Kabupaten Gorontalo Utara”. *Jurnal Hukum Justitia. Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Vol. 1 No. 1 September 2013.*

Disertasi/Tesis/Skripsi

Arif Nurcahyono. “*Analisis Hukum Ancaman Pidana Kasus Penguasaan Tanah Tanpa Hak Ditinjau Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Prp No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin yang Berhak/Kuasanya*”. *Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.*

Sri Susyanti Nur. 2009. *Aspek Hukum Penyediaan Tanah Perkotaan dalam Bentuk Bank Tanah Guna Menunjang Pembangunan Kota Berkelanjutan. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.*

Supriadi. 2017. *Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.*

Laporan/Majalah/Pamflet Tahunan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. 2021. *Indikator Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2021. Gowa.*

-----, 2022. *Kecamatan Parangloe dalam Angka 2022. Gowa.*

-----, 2022. *Kabupaten Gowa dalam Angka (Gowa Regency in Figures) 2022. Gowa.*

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap).*

Chaerani Arief. “Sekilas Cerita Kabupaten Berjuluk Butta Bersejarah”. *Gowa Ta’ Magazine, Edisi Ketujuh. 3 Januari 2022.*

Konsorsium Pembaruan Agraria. 2021. *Catatan Akhir Tahun 2021: "Penggusuran Skala Nasional (PSN)"*.

----- . 2022. *Catatan Akhir Tahun 2022: Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Petani Meningkat*.

Mark Roberts. (et al.). 2019. *Time to Act: Realizing Indonesia's Urban Potential*. Washington, D.C.: World Bank Group

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar yang dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Pertanian.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PARANGLOE
DESA BELAPUNRANGA

Alamat : Jl. Poros Belapunranga Km. 6 Kasimburang Kode Pos 92173

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 02 / DBP / II / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : BAHTIAR, S.IP
2. NIP : 19680210200906 1 004
3. Jabatan : SEKRETARIS DESA BELAPUNRANGA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SALLY OCTAVIA NGITISASMITA
No.Pokok : B011171435
No.HP : 085211289317
Prog.Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Alamat : Jl.Nuri Lama No.80 H

Yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dalam penyelesaian Skripsi yang berjudul “ **KEDUDUKAN HUKUM TANAH HASIL OKUPASI DI DESA BELAPUNRANGA KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA**” dari tanggal 20 Februari sampai 22 Februari 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasimburang, 22 Februari 2023

KEPALA DESA
Sekretaris,
KEPALA DESA
BELAPUNRANGA
BAHTIAR, S.IP
NIP. 19680210 200906 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Tumanurung No. 2 Komp. Gabungan Dinas-Dinas Pemda Gowa

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/1185/DPUPR

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SALLY OCTAVIA NGITISASMITA**
Tempat /Tanggal Lahir : Makassar / 02 Oktober 1998
Nomor Induk Mahasiswa : B011171435
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Sstudi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa / Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Nuri, Makassar

Telah melaksanakan survey penelitian/pengambilan data mulai tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa dengan judul penelitian "**KEDUDUKAN HUKUM TANAH HASIL OKUPASI DI DESA BELAPUNRANGA, KABUPATEN GOWA**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sungguminasa, 22 Mei 2023


IL ALIYUDDIN, SE,MM
Pangkat: Pembina - IV/a
NIP. 19680427199003 1 012